

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAKSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	JUAL BELI DAN QIYAS DALAM HUKUM ISLAM	17
	A. Jual Beli	17
	1. Pengertian Jual Beli	17
	2. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
	3. Macam-macam Jual Beli	25
	4. Khiar Dalam Jual Beli	31
	5. Badan Perantara	32
	6. Dasar Hukum Jual Beli	32
	7. Hukum Jual Beli	34
	B. Qiyas	35
	1. Pengertian Qiyas	35
	2. Rukun dan Syarat Qiyas	36
	3. Macam-macam Qiyas	38
BAB III	DESKRIPSI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT (MOBILE ZAKAT) DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA	41
	A. Profil PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya	41
	1. Sejarah PKPU Surabaya	41
	2. Struktur Organisasi PKPU Surabaya	42
	3. Program-Program PKPU Surabaya	42
	B. M-Zakat (Mobile Zakat)	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menghendaki setiap individu yang hidup di masyarakat mendapat kehidupan yang layak, sehingga mereka mampu berinteraksi pada lingkungannya tanpa timbul rasa rendah diri bahkan rasa putus asa. Dalam masalah perekonomian, kemiskinan merupakan salah satu realita kehidupan, kemiskinan terkadang juga dapat menyebabkan seseorang rela untuk melepaskan keyakinan, kehormatan, bahkan keluarganya.

Islam menolak kemiskinan secara tegas sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa>' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (Q.S. An-Nisa>').¹

Islam adalah agama yang mempunyai konsep keadilan tentang masalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Sehubungan dengan hal itu Islam memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, yaitu dengan zakat. Konsep zakat yang

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

ditawarkan Islam merupakan sebuah konsep keadilan di bidang ekonomi, karena dalam zakat tersebut terdapat hak si miskin dalam harta si kaya.

Ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 110).²

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya.³ Diantara beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan zakat yaitu:

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah: 276).⁴

Dalam Q.S. Al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, h. 5

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Taubah: 71).⁵

Dalam Q.S. Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Taubah: 103).⁶

Dalam Q.S. Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Q.S. Al-Hajj: 41).⁷

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat masuk dalam kategori ibadah wajib. Kewajiban mengeluarkan zakat di dalam Al-Qur'an selalu dihubungkan dengan kewajiban mendirikan shalat.

⁵ Ibid, h. 291

⁶ Ibid, h. 297

⁷ Ibid, h. 518

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa membayar zakat sangatlah ditekankan seperti halnya kewajiban mendirikan shalat. Menurut Yusuf Qardawi, zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijrah dalam periode Madinah. Beliau menegaskan bahwa ayat-ayat zakat turun di Madinah berisi tentang kewajiban zakat dan menjelaskan beberapa hukum zakat dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 110.⁸ Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, mempunyai dwi fungsi sekaligus, *hablumminalla*h yaitu fungsi yang menyangkut hubungan dengan Allah dan *hablumminanna*s yaitu fungsi yang menyangkut aspek kemanusiaan.

Kata zakat apabila ditinjau dari segi bahasa memiliki pengertian suci, tumbuh, berkah dan terpuji,⁹ sedangkan istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan menumbuhkan. Hal ini berarti zakat itu menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya semakin lebih berdaya.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk, h. 62

⁹ *Ibid*, h. 34

kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikekola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.¹⁰

Pada masa khulafaurrasyidin, penarikan dan pembayaran zakat telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Dengan telah ditetapkannya beberapa orang tertentu untuk mengambil zakat pada daerah-daerah yang telah ditentukan. Melihat contoh, maka keluarlah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut pada Bab III pasal 6 dan dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengelolaan zakat sudah selayaknya menggunakan teknologi untuk setiap prosesnya. Dengan menggunakan teknologi, proses pengelolaan zakat akan semakin cepat dan mudah. Hambatan jarak yang selama ini sering menjadi penghambat dalam pertukaran data dan informasi lembaga zakat kini bisa teratasi. Teknologi informasi yang terintegrasi memudahkan pengelola zakat untuk mengontrol setiap dana zakat yang dititipkan *muzakki* untuk kemudian disalurkan tepat kepada *mustahiqnya*.¹²

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. V

¹¹ *Ibid.*, h. 130

¹² Lutfiyannah Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card*, h. 2

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan masalah zakat telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh “M. Choirul Anwar” dengan judul “**Pendayagunaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam Perekonomian Modern**”,¹⁶ yang membahas tentang pandangan-pandangan fiqh klasik tentang konsep harta zakat, kemudian mengemukakan dinamika perkembangan fiqh zakat terutama yang berkaitan dengan harta zakat, merektualisasikan konsep harta zakat serta pendayagunaannya dalam perekonomian modern.

Selanjutnya, penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh “Lutfiyannah Wahyuni” dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card”,¹⁷ yang menyatakan bahwa pemegang kartu kredit dapat membayarkan zakatnya di lembaga-lembaga atau badan amal yang menerima pembayaran zakat melalui kartu kredit (*Credit Card*). Pembayaran dapat

¹⁶ M. Choirul Anwar, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2003 dengan judul skripsi “Pendayagunaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam Perekonomian Modern”

¹⁷ Lutfiyannah Wahyuni, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2007 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card*”

program, deskripsi tentang program *m-zakat* yang meliputi; pengertian *m-zakat*, sistem kerja *m-zakat*, jenis-jenis layanan *m-zakat*, manfaat *m-zakat*, akad dalam praktek penggunaan *m-zakat*, dasar hukum *m-zakat*, pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya; penerimaan zakat, meliputi bentuk kerjasama antara PKPU dengan penyedia layanan, dan mekanisme penerimaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU Surabaya, mekanisme distribusi zakat oleh *m-zakat* di PKPU Surabaya.

BAB IV, Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya, data yang membahas analisis dari segi penerimaan zakat, dan analisis hukum Islam tentang mekanisme pengelolaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU Surabaya menurut hukum Islam.

BAB V, Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

BAB II

JUAL BELI DAN QIYAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut *etimologi*, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Penukaran sesuatu dengan sesuatu.”¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (29)

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”(Q.S. Fathir: 29).²

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

2.

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنِ شَرِّعِي

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 73

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 700

3.

مُقَابَلَةُ مَالٍ قَائِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ
 “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tas}arruf) dengan
 ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.”

4.

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
 “Tukar-menukar harta benda dengan benda yang lain dengan cara yang
 khusus (dibolehkan).”

5.

مُبَادَلَةُ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
 الْمَأْدُونِ فِيهِ
 “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan
 atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang
 diperbolehkan.”

6.

عَقْدٌ يَفُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ
 “Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka
 jadilah penukaran hak milik secara tetap.”

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’ dan disepakati.³

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

مبادله شيء مر غوب فيه على وجه مفيد مخصوص

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69

*Artinya : “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*⁴

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁵

Abu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan :

مبا دله المال بالمال تملیکا

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada hak milik dan pemilik, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Kemudian kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur ulama' yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama' Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah "sesuatu yang

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 113

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 69

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa>: 141).⁶

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*mak'ud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut :

1. Suci
2. Memberi manfaat menurut *syara'*
3. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal yang lain
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi
6. Milik sendiri
7. Diketahui (*dilihat*)⁷

Menurut Jumhur Ulama', bahwa syarat jual beli adalah :

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz*

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

(*menjelang balig*}), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, menghibahkan atau mewakafkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁸

Mengenai rukun jual beli yang berkaitan dengan *m-zakat* adalah:

1. Akad (ijab qabul), yaitu pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu terdapatnya Lembaga Penyedia Layanan sebagai penjual, dan *muzakki* sebagai pembeli
3. Ma'kud alaih (objek akad), yaitu layanan *m-zakat* (*mobile phone zakat*)

Sedangkan mengenai syarat jual beli yang berkaitan dengan *m-zakat* yaitu *muzakki* jelas berakal karena dapat berpikir untuk mengirimkan *sms* untuk pembayaran zakatnya, dan penjual tidak dapat langsung bertindak sebagai pembeli, hal ini dikarenakan pihak penjual adalah berupa Lembaga yang mempunyai program layanan *m-zakat*, sehingga penjual tidak dapat bertindak sebagai pembeli dalam waktu yang bersamaan.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 118

- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau pada waktu yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.¹¹

Barang yang diperjual belikan di sini adalah *m-zakat*, syarat untuk menjualbelikannya telah memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *as-S}aman* (الثمن) dan *as-Si>r* (السعر). *As-S}aman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si>r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.¹²

Mengenai jual beli emas, para ulama' sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak tidaklah dibolehkan kecuali harus sebanding serta tunai, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama Makkah yang mengikuti pendapatnya, mereka

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 118

¹² *Ibid.*, h. 118

mbolehkan jual beli barang tersebut dengan ada penambahan dan mereka melarang menjualnya dengan ada penundaan saja.¹³

Jual beli secara kontan ini sesuai dengan hadis| :

نهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

Artinya : “*Rasulullah saw melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan.*”¹⁴

Nilai tukar dalam *m-zakat* disini adalah penukaran sejumlah pulsa dengan sejumlah uang untuk pembayaran zakat.

3. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk :

1. Jual Beli yang Sahih

Jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak lagi ada khiyar.¹⁵

2. Jual Beli yang Bat}il

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 384

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, III, h. 51

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 128

setelah barang tersebut terjual, maka kelebihan tersebut adalah sah bagi perantara.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula *komisioner*, *makelar*, atau *agen*, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

Berdagang secara *simsar* diperbolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.²⁵

6. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam Islam memiliki landasan yang kuat.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).²⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. Al-Baqarah: 198).²⁷

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa>’: 29).²⁸

²⁵ *Ibid.*, h. 86

²⁶ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h.69

²⁷ *Ibid.*, h. 48

²⁸ *Ibid.*, h. 122

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli...”(Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁹

Allah telah mengharamkan riba dan memberi sekian banyak peringatan sebelum ini. “Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan Tuhannya, lalu berhenti (dari praktek riba),....” Kata dari Tuhannya memberi kesan bahwa yang dinasihatkan itu pastilah benar dan bermanfaat, sehingga seorang muslim yang benar-benar percaya kepada-Nya pasti akan mengindahkan peringatan itu, sebaliknya yang menghalalkan riba, mempersamakannya dengan jual beli, atau melakukan transaksi atas dasar riba, maka berarti dia tidak percaya kepada Allah sehingga mengabaikan nasihat-Nya.³⁰

Dalam sabda Rasul disebutkan bahwa salah satu pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang mabrur :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya : “Nabi Muhammad pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab : “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (hadits riwayat al-Barzaar dan al-Hakim)³¹

²⁹ Ibid., h. 70

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 593

³¹ Al-Shon’ani, *Subulus Salam*, Juz III, diterjemahkan M. Abu Bakar, h. 14

al-qur'an dan hadis|, karena persamaan tujuan hukumnya secara parsial (*'Illat*-nya). Tujuan hukum tersebut (*'Illat*) adakalanya terdapat dalam teks al-qur'an dan hadis| yang disebut dengan *Nas}{s} Mans}{us}{ah* (tujuan hukum yang terdapat dalam dalam teks al-qur'an dan hadis|) dan adakalanya tujuan hukum (*'Illat*) dirumuskan dengan akal manusia yang hasilnya disebut dengan *'Illat Mustanbat}{ah* (tujuan hukum yang dihasilkan dari pemikiran manusia).³³ Pada *m-zakat* kali ini termasuk pada *'Illat Mustanbat}{ah*, yaitu berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama'.

2. Rukun dan Syarat Qiyas

Untuk mempraktekkan qiyas itu, para ulama' ushul fikih menetapkan rukun qiyas sebagai berikut.³⁴

1. *Asl* (masalah pokok yang menjadi sandaran analogi) dan hukumnya (Hukum *al-Ashl*) adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam al-qur'an atau sunnah Rasulullah Saw. Dalam hal ini yang menjadi *asl* adalah "jual beli".

Pada hukum *al-asl* terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Hukum yang hendak dipindah kepada cabang (*Far'u*) masih ada pada pokok (*asl*)

³³ Abdullah Al-Hamid, *Metodologi Studi Hukum Islam*, h. 124

³⁴ *Ibid.*, h. 127

2. Hukum yang terdapat pada hukum pokok hendaklah hukum *syara'*, bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa
 3. Hukum pokok bukan merupakan hukum pengecualian
 4. Hukum pokok hendaklah berupa hukum *syara'* yang dapat diketahui *'Illat* (sebab atau tujuan hukum) hukumnya
 5. Hukum pokok itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw
2. Masalah baru (*faru'*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an, al-sunnah atau ijmak. Dalam hal ini yang menjadi masalah baru (*faru'*) yaitu *m-zakat*.
 3. *'Illat* (tujuan hukum parsial atau pada satuan masalah). Dalam penetapan qiyas, berdasarkan tujuan hukum yang terdapat dalam al-qur'an atau al-sunnah, masalah baru akan ditetapkan hukumnya.

'Illat pada al-qur'an mengenai masalah ini diantaranya:

Q.S. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah: 198)³⁵

Q.S. An-Nisa>’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).³⁶

Kedua ayat tersebut merupakan salah satu dari ciri-ciri kata untuk mengetahui *Illat* dari masalah jual beli, yaitu terdapat kata أَنْ . Jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Begitu juga dengan hukum *m-zakat* adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan pada *m-zakat* terdapat unsur suka sama suka pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*, disamping itu dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong pada program pendayagunaan zakat produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

3. Macam-macam Qiyas

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 111

³⁶ *Ibid.*, h. 122

Para ulama' ushul fikih mengemukakan bahwa Qiyas dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:³⁷

- a. Dilihat dari segi kekuatan '*Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) dibandingkan dengan yang terdapat pada masalah pokok (*asl*) dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:
 1. *Qiyas Awla*, yaitu bahwa '*Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) lebih utama daripada '*Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)
 2. *Qiyas Musawi*, yaitu Qiyas di mana '*Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) sama kuatnya dengan '*Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)
 3. *Qiyas Adna*, yaitu Qiyas di mana '*Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) lebih rendah bobotnya bila dibandingkan dengan '*Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)

Dalam hal ini *m-zakat* termasuk pada *Qiyas musawi*, hal ini dikarenakan masalah baru (*Far'u*) dalam hal ini adalah *m-zakat* sama kuatnya dengan masalah pokok (*Asl*), pada pembayaran zakat oleh *muzakki* yang disamakan dengan jual beli, yaitu *muzakki* di sini sebagai pembeli dari penjualan *m-zakat* yang ditawarkan oleh operator. Hukum jual beli adalah diperbolehkan, begitu juga pada *m-zakat*.

³⁷ Abdullah Al-Hamid, *Metodologi Studi Hukum Islam*, h. 136

- b. Dilihat dari segi jelas atau tidaknya *'Illat* sebagai landasan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
1. *Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas *'Illat* yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara masalah pokok (*Asl*) dan masalah baru (*Far'u*) dari segi kesamaan *'Illat-nya*.
 2. *Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas *'Illat* yang disimpulkan dari hukum pokok (*Asl*).

Dalam hal ini, *m-zakat* termasuk pada jenis *Qiyas Jali*. Hal ini dikarenakan terdapat kesamaan dari segi pembayaran zakat melalui layanan *m-zakat* dengan jual beli, di mana *muzakki* telah merelakan untuk pemotongan sejumlah pulsanya pada waktu mengirimkan *sms* untuk pembayaran zakatnya.

Mengenai akad dalam terjadinya transaksi *M-Zakat* yaitu jika *muzakki* telah mengirim *sms* yang sesuai dengan format pada layanan *M-Zakat*, maka hanya dengan *sms* itu akad jual beli sudah tertunaikan.

Karena menurut para ulama', *M-Zakat* ini diqiyaskan pada jual beli. Jadi, jika *muzakki* sudah mengirim *sms* maka terdapat suatu kerelaan. Hal ini juga sebagai dasar dalam jual beli, *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (suka sama suka).⁶

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Begitu juga dengan hukum *m-zakat* adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan pada *m-zakat* terdapat unsur suka sama suka pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*, disamping itu dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong pada program pendayagunaan zakat produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

6. Dasar Hukum *M-Zakat*

Pada dasarnya tidak ada suatu hukum yang dengan jelas mengatur tentang *m-zakat*, apakah layanan dan program *m-zakat* diperbolehkan atau dilarang, maka selain dasar hukum tentang zakat, *m-zakat* ini diqiyaskan pada dasar hukum jual beli.⁷

Dalam hal pembayaran zakat lewat *online* (seperti ATM, kartu kredit, *sms*), para ulama' berpendapat hal itu sama dengan akad tulisan, bahwa

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Kaimuddin, 20 Oktober 2008

Handphone saat ini sedang populer dan telah dimiliki oleh hampir setiap orang. Kecanggihan, kepraktisan, dan kemudahannya membuat setiap orang ingin memiliki dan menggunakan berbagai layanan yang berfasilitas dengan *handphone*, termasuk salah satunya adalah program *M-Zakat*, dimana program ini melayani pembayaran zakat dengan "pesan pendek" atau *sms (short message service)*.

Dengan berzakat melalui via *sms*, seseorang tidak perlu lagi membawa uang cash atau beras. Penggunaan layanan *m-zakat* tidak hanya untuk pelanggan kartu prabayar saja tetapi juga pascabayar. Layanan ini disediakan untuk pembayaran zakat fitrah dan zakat *mal* jika dilakukan pada waktu bulan ramadhan, dan selain bulan Ramadhan maka termasuk pembayaran shadaqah atau infaq.

Fasilitas ini diciptakan oleh sebuah perusahaan solusi teknologi informasi "Arshey Communication", sebuah fasilitas yang disediakan untuk para pembayar zakat yang bersifat lintas amil zakat, lintas operator, dan lintas *mustahiq* (penerima zakat).⁹ Disebut lintas *amil* dikarenakan *muzakki* dapat memilih kepada amil zakat mana *muzakki* akan membayarkan zakatnya. Untuk lintas operator, *muzakki* dapat menggunakan operator selular apapun. Dan lintas *mustahiq*, yaitu *muzakki* dapat memilih kepada siapa zakatnya diberikan.

⁹ [Http: //www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), 8 Oktober 2004

Layanan semacam ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan pembayaran zakat bagi orang-orang yang hendak membayarkannya, bila tidak mempunyai waktu untuk membayarkannya secara langsung.

PKPU Online dan Arshey Communication, bekerjasama dengan Telkomsel dan Indosat untuk meluncurkan *M-Zakat (Mobile Phone Zakat)*, yang membantu memudahkan pembayaran zakat melalui "sms ponsel".

Arshey adalah sebuah perusahaan solusi teknologi informasi, komunikasi dan periklanan yang mengambil konsep syariah sebagai dasar, melontarkan zakat lewat *sms* ini untuk menjawab kebutuhan para pembayar zakat yang sering mengalami kendala teknis dan waktu dalam membayarkannya, yaitu dengan memberikan kemudahan membayar zakat lewat *sms* telepon selular.

Dengan program *m-zakat*, pembayar zakat yang mengirimkan *sms* ke nomor 92528, akan dihubungkan pada servis otomatis pembayaran zakat dengan pilihan amil dan penerima zakat (*mustahfiq*) secara bebas, sesuai keinginan para pembayarannya (*muzakki*).

Seluruh dana yang terkumpul melalui *sms* ini akan masuk ke account amil, lengkap dengan pilihan *mustahfiqnya* (penerima zakat), yang sesuai dengan keinginan *muzakki* (pembayar zakat). Semua ini berada dalam pengawasan Majelis Syariah *M-Zakat*, diaudit oleh lembaga

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA

A. Analisis Dari Segi Penerimaan Zakat

Zakat melalui *sms* (*short message service*) merupakan salah satu layanan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Dasar hukum akadnya masih disamakan dengan jual beli. Dimana jika *muzakki* telah mengirimkan *sms* sesuai format dalam layanan *M-Zakat*, maka akadnya sudah tertunaikan. Hal ini sudah termasuk transaksi jual beli, dimana antara pihak penjual dan pembeli sudah terdapat suatu kerelaan yang merupakan dasar hukum dalam jual beli, yaitu *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (suka sama suka).

Mengenai bentuk penyerahan zakat, menurut jumhur ulama' bentuk zakat yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Sebagian fuqaha memandang bolehnya menunaikan zakat dalam bentuk uang, jika kondisi orang-orang fakir mengharuskan itu.

Menurut Ibnu Qayim, zakat mengikuti maslahat pemilik harta yang mengeluarkannya dan maslahat orang fakir yang mengambilnya. Salah seorang dari keduanya tidak dibebani sesuatu di atas kemampuannya, sehingga keringanan dan kemudahan tidak hilang dari syariat. Beliau berkesimpulan bahwa yang

Berdasarkan ijma' ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis.⁴ Pada *m-zakat*, perpindahannya yaitu dalam bentuk sejumlah pulsa yang dibayarkan para *muzakki* kepada operator yang kemudian akan diserahkan kepada Lembaga Penyedia Layanan dan dibagikan kepada 8 LAZ yang bekerjasama adalah dalam bentuk sejumlah uang. Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai analisis dari segi penerimaan zakat.

Mengenai tambahan biaya jasa layanan yang ditentukan, dengan prosentase bagiannya 60% untuk operator dan 40% untuk Lembaga Penyedia Layanan, adalah merupakan laba atau keuntungan bagi mereka, karena dalam hal ini mereka bertindak sebagai penjual yang bekerjasama dalam program layanan *m-zakat*. Dalam jual beli, pengambilan keuntungan adalah diperbolehkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa>’: 29).⁵

Pendapatan yang diperoleh dari tambahan biaya jasa layanan tersebut adalah sah, hal ini dikarenakan pihak operator dan Lembaga Penyedia Layanan adalah sebagai penjual.

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

Sedangkan dana pokok zakat diberikan utuh oleh Lembaga Penyedia Layanan kepada PKPU sebesar Rp. 12.500 dalam bentuk uang. PKPU mendapat bagian dari *m-zakat* ini, karena dia bertindak sebagai amil yang menyalurkan dana zakat. Perolehan dana untuk masuk ke saldo keuangan PKPU sebagai amil adalah maksimal 12,5% dari perolehan dana zakat yang diterima, itu pun setelah dibagi dengan program PKPU yang lain, seperti yang telah dijelaskan pada bab III.

Yang dimaksudkan dengan amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustah}iqnya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustah}iq* yang delapan. Seperti yang terdapat pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁶

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.⁷ Menurut jumhur ulama', persentase perolehan hak bagi amil tidak boleh melebihi dari 12,5%, hal ini dikarenakan masih ada 8 *as}na>f* yang juga membutuhkan dana zakat tersebut.

Pengambilan hak amil bagi PKPU tersebut adalah sah, karena PKPU juga termasuk dalam 8 amil yang disebutkan dalam al-qur'an.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, menurut para ulama' wajib disalurkan kepada 8 *as}na>f* yang disebutkan dalam al-Qur'an dikurangi budak belian, karena sudah tidak ada lagi. Karena perbudakan terhadap bangsa masih ada sampai saat ini, maka budak masih termasuk dalam 8 *as}na>f*. Tetapi golongan fakir miskin menjadi tujuan utama dari zakat agar tujuan hidup mereka berkecukupan.⁸

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di masa kini tentunya memerlukan keterbukaan. Di zaman transparansi ini, ketika semua orang menuntut agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggungjawabkan, sifat keterbukaan itu penting bagi semua pihak yang telah menunaikan zakat serta mengeluarkan hartanya dalam

⁷ Yusuf Qard}awi, *Hukum Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk, h. 545

⁸ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 103

8 *as}na>f* dan juga pada pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan pada program-programnya, hal ini sesuai dengan yang disyari'atkan oleh hukum Islam.

Menurut hukum Islam terhadap pelaksanaan penerimaan dana zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada operator dengan pemotongan sejumlah pulsa yang kemudian diserahkan dalam bentuk uang, perolehan yang diambil oleh pihak operator dan Lembaga Penyedia Layanan sebagai penjual, bagian yang diperoleh untuk amil dalam hal ini yaitu PKPU, serta distribusi dana zakat yaitu diberikan kepada 8 golongan *as}na>f* dan diutamakan pada fakir miskin, sedangkan pendayagunaan dana zakat pada aspek sosial ekonomi yang bertujuan agar dapat bermanfaat, hal ini adalah sah dan tidak melanggar syari'at.

